

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendahuluan

Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah mulai dibangun pada tahun 1979 dengan dana APBN dan resmi berdiri pada tanggal 5 Juli 1984 dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 350/Menkes/SK/VII/1984 tentang pembentukan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Pusat Kelas B di Palu. Status awal pengelolaan Rumah Sakit Jiwa Pusat Kota Palu di bawah Dirjen Pelayanan Medik Depkes-RI.

Pada tahun 2003 Rumah Sakit Jiwa Pusat Palu berubah nama dan berkembang menjadi Rumah Sakit Jiwa Madani dengan penambahan 4 pelayanan spesialisik dasar (Non Jiwa)

Pada tanggal 27 Desember 2010 melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 900/695/RSD Madani-G.ST/2010 tentang penetapan pola pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh.

b. Tempat dan Kedudukan

Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah berlokasi di jalan Thalua Konchi No. 1 Kelurahan Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara Kota Palu.

c. Susunan Organisasi

Susunan organisasi RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 2 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Direktur
2. Bagian Tata Usaha, Membawahi:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset ; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi;
3. Bidang Pelayanan, membawahkan;
 - a. Seksi Pelayanan Medis; dan
 - c. Seksi Keperawatan dan Kebidanan;
4. Bidang Penunjang Pelayanan, membawahi:
 - a. Seksi Penunjang Medis; dan
 - b. Penunjang Non Medis;
5. Komite Medik;
6. Komite Keperawatan;
7. Komite Mutu;
8. Satuan Pengawas Internal; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Tugas Pokok Dan Fungsi

Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah bertugas menyelenggarakan sebagai urusan pemerintah dibidang pelayanan kesehatan yang telah menjadi urusan daerah yang telah tertuang dalam peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 43 Tahun 2009 Bab II Pasal 2 dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

d. Tugas Pokok Dan Fungsi (Lanjutan)

1. Tugas Pokok

Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan, melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

2. Fungsi

- a. Pelayanan medis
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis
- c. Pelayanan asuhan keperawatan
- d. Pelayanan rujukan
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan
- g. Pengelolaan administrasi dan keuangan

e. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan di RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
- 7) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

e. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan (Lanjutan)

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Pemerintah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2008 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 18) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah;
- 20) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- 21) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dinyatakan pada PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU bahwa RSUD bertindak sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi. BLUD RSUD sebagai entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBN/APBD;
- 2) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
- 4) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
- 5) Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
- 6) Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- 7) Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
- 8) Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
- 9) Laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (Lanjutan)

BLUD juga sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditunjukkan kepada entitas pelaporan dan laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

b. Penyajian Laporan Keuangan

BLUD RSUD menyajikan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional;
- 5) Laporan Perubahan Ekuitas;
- 6) Laporan Arus Kas
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan

c. Pendapatan

1) Pendapatan - LRA

Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima pada Bendahara Penerimaan rumah sakit. Akuntansi pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat nettonya. Pendapatan rumah sakit berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan penerimaan berasal dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan Sewa, Pengolahan/Pembuangan Limbah, Jasa Layanan dan Penerimaan Lain-Lain.

2) Pendapatan - LO

Pendapatan LO diakui pada saat rumah sakit telah melakukan jasa layanan kepada pasien ataupun pihak ketiga. Yang merupakan penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

d. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran rumah sakit yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dan telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara pengeluaran.

Belanja modal tanah diakui sebesar biaya perolehan tanah yang mencakup harga pembelian biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Belanja modal diukur dengan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan. Apabila menggunakan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat pengakuan belanja.

Belanja Modal peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Belanja modal gedung dan bangunan diakui sebesar harga perolehan gedung dan bangunan sampai siap untuk digunakan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

d. Belanja (Lanjutan)

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan diakui sebesar seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya operasional yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain belanja pegawai, belanja barang non investasi dan belanja operasional lainnya.

e. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset maupun persediaan atau timbulnya kewajiban.

f. Kas dan Setara Kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD.

Setara kas (cash equivalent) adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi setara kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Giro adalah simpanan pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan antara lain dengan bilyet giro.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara BLUD RSUD.

Kas pada bendahara pengeluaran diakui pada saat diterima dan saat realisasi belanja dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

g. Piutang

Piutang adalah hak yang muncul dari penyerahan pelayanan jasa atau penyerahan uang, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BLUD RSUD dan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain tersebut untuk melunasi pembayaran atas jasa yang telah diterimanya atau utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Piutang dari kegiatan operasional adalah piutang yang timbul karena penyerahan pelayanan (jasa) dalam rangka kegiatan BLUD RSUD, seperti piutang kepada pasien rawat inap dan rawat jalan.

Piutang dari kegiatan non operasional adalah piutang yang timbul di luar kegiatan pelayanan medis, yang jumlahnya tidak material, seperti piutang karyawan dan piutang sewa.

Piutang dari kegiatan operasional diakui pada saat seluruh kondisi berikut terpenuhi:

- 1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- 2) Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh;
- 3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
- 4) Beban yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur.

Piutang atas jaminan diakui berdasarkan dokumen hasil verifikasi atas klaim yang diajukan.

Piutang atas jaminan pada akhir tahun diakui berdasarkan klaim yang diajukan dan dilakukan penyesuaian setelah dokumen verifikasi diperoleh.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

g. Piutang (Lanjutan)

Piutang dari kegiatan non operasional diakui pada saat jasa sewa telah diberikan kepada penyewa atau uang pinjaman telah diberikan kepada karyawan.

Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau persentase dari pendapatan. Penyisihan piutang tak tertagih ditetapkan berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

- a. Piutang dengan kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, tarif penyisihan piutang tak tertagih sebesar 0,5%;
- b. Piutang dengan kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, tarif penyisihan piutang tak tertagih sebesar 10%;
- c. Piutang dengan kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, tarif penyisihan piutang tak tertagih sebesar 50%;
- d. Piutang dengan kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, tarif penyisihan piutang tak tertagih sebesar 100%.

Penyisihan piutang tak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban penyisihan piutang.

h. Persediaan

Persediaan adalah:

- 1) Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan BLUD RSUD;
- 2) Bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan BLUD RSUD.

Persediaan pada BLUD RSUD dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

i. Beban Dibayar Di Muka

Beban dibayar di muka adalah pembayaran biaya dimuka, yang manfaatnya akan digunakan untuk satu periode atau lebih kegiatan BLUD RSUD di masa yang akan datang.

Beban dibayar di muka berfungsi antara lain untuk membiayai operasional tidak lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Biaya dibayar di muka terdiri dari:

- 1) Premi Asuransi;
- 2) Sewa Dibayar Di Muka; dan
- 3) Pajak Kendaraan Bermotor.

j. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan rumah sakit atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Aset tetap diperoleh melalui pembelian/pembangunan yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBD, pertukaran dengan aset lain serta donasi dari masyarakat, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah dan diperoleh dari hibah tidak terikat diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

j. Aset Tetap (Lanjutan)

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

k. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset rumah sakit yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari:

- 1) Tagihan Jangka Panjang;
- 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- 3) Dana Kelolaan;
- 4) Aset yang Dibatasi Penggunaannya;
- 5) Aset Tak Berwujud;
- 6) Aset Lain-lain
- 7) Akumulasi Amortisasi

l. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

m. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan kecuali bagian yang akan dan telah jatuh tempo termasuk akan menjadi utang jangka panjang dengan status perjanjian baru atau dibayar dengan menggunakan dana yang telah disisihkan dari aset lancar.

n. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih rumah sakit yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban rumah sakit pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

a. Pendapatan - LRA

Penerimaan RSUD Madani untuk tahun anggaran 2023 adalah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sumber sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Jasa Layanan Umum			
Pendapatan Jasa Layanan	98.237.000.000,00	44.034.105.308,00	45%
Pendapatan Rawat Jalan	375.000.000,00	365.042.547,00	97%
Pendapatan Rawat Darurat	25.000.000,00	1.528.000,00	6%
Pendapatan Rawat Inap	973.000.000,00	757.861.164,00	78%
Pendapatan Hibah	-	-	N/A
Pendapatan Hasil Kerjasama	250.000.000,00	441.525.500,00	177%
Pendapatan Lain-lain BLUD yang sah	140.000.000,00	671.355.578,25	480%
Jumlah Pendapatan - LRA	100.000.000.000,00	46.271.418.097,25	46%

b. Belanja

Belanja RSUD Madani adalah pengeluaran yang digunakan untuk menanggung kebutuhan operasional rumah sakit maupun untuk pengadaan aset rumah sakit. Adapun realisasi belanja RSUD Madani untuk tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	184.763.152.795,00	77.640.437.969,22	42,02%
Belanja Modal	29.765.538.000,00	55.180.918.612,02	185,39%
Jumlah Belanja	214.528.690.795,00	132.821.356.581,24	61,91%

Realisasi belanja RSUD Madani untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp132.821.356.581,24 atau 61,91% dari belanja yang dianggarkan sebesar Rp214.528.690.795,00

Rincian masing-masing belanja tahun anggaran 2023 serta perbandingannya anggaran adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai			
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	-	28.468.214.542,00	N/A
Belanja Pegawai Non PNS APBD	3.216.250.000,00	3.193.100.000,00	99,28%
Belanja Pegawai Non PNS BLUD	5.940.840.000,00	2.936.050.000,00	49,42%
Belanja Barang dan jasa			
Belanja Persediaan	16.134.147.320,00	15.789.339.544,22	97,86%
Belanja Jasa	81.384.550.822,00	21.285.122.430,00	26,15%
Belanja Pemeliharaan	2.833.051.173,00	2.669.015.573,00	94,21%
Belanja Perjalanan Dinas	1.665.713.823,00	1.667.463.753,00	100,11%
Belanja Langganan Daya dan Jasa	1.954.331.700,00	1.632.132.127,00	83,51%
Jumlah Belanja Operasi	113.128.884.838,00	77.640.437.969,22	68,63%

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

2) Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengadaan aset tetap maupun aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari pembelian peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan. Belanja modal untuk tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.861.562.313,00	49.220.436.249,00	96,77%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.452.760.000,00	5.960.482.363,02	70,52%
Jumlah Belanja Modal	59.314.322.313,00	55.180.918.612,02	7,49%

4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Mutasi saldo anggaran lebih untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	60.278.564.388,49	101.813.874.395,21
Penggunaan SAL	-	-
Sub Total	60.278.564.388,49	101.813.874.395,21
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	(86.549.938.483,99)	(73.281.316.290,72)
Pendapatan dari Alokasi APBD	40.351.684.366,00	31.746.006.284,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	14.080.310.270,50	60.278.564.388,49

Berikut penjelasan mutasi saldo anggaran lebih:

- 1) Saldo anggaran lebih awal tahun 2023 sebesar Rp60.278.564.388,49 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2022.
- 2) Sisa kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp86.549.938.483,99 pada tahun 2023 merupakan selisih antara pendapatan dengan belanja LRA.
- 3) Saldo anggaran lebih akhir pada tahun 2023 sebesar Rp14.080.310.270,50 sama dengan jumlah saldo kas per 31 Desember 2023.

5. PENJELASAN NERACA

a. Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	2023	2022
Kas Tunai		
Di Bendahara Penerimaan	-	-
Di Bendahara Pengeluaran	139.249.080,42	125.334.366,44
Bank di Bendahara Penerimaan:		
Bank Sulteng Rek: 01.03.25850-6	722.651.864,00	43.299.245.029,00
Bank Mandiri Rek: 1510010053632	10.448.711.527,99	12.451.961.108,06
Kas di Bendahara Pengeluaran:		
Bank Suteng Rek: 01.03.258490	331.706.854,00	462.823.299,00
Bank Mandiri Rek: 1510010053780	2.437.990.944,09	3.939.200.585,99
Jumlah Kas dan Setara Kas	14.080.310.270,50	60.278.564.388,49

Kas Tunai pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp139.249.080,42 merupakan panjar belanja yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2023.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5. PENJELASAN NERACA (Lanjutan)

b. Piutang Usaha

Saldo Piutang Usaha Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Piutang Pasien Tunai	747.910.661,17	729.834.761,17
Piutang BPJS Kesehatan	8.070.612.100,00	6.336.697.300,00
Piutang Jamkesprov	-	11.245.550,00
Piutang Jasa Raharja	-	432.310,00
Piutang BPJS Ketenagakerjaan	12.070.738,00	15.421.297,00
Piutang Jampersal	-	-
Piutang Jamkesda	92.754.511,00	751.616.991,00
Piutang Klaim Covid-19	-	35.669.000,00
Piutang PT. Bank Sulteng	42.000.000,00	12.000.000,00
Piutang PT. ADHI KARYA	2.617.464,00	-
Piutang PT. PP URBAN -MKI/ METALINDO	17.809.726,00	-
Piutang PT. PP PERSERO	1.359.770,00	-
Penyisihan Piutang	(1.248.056.534,42)	(1.993.447.654,94)
Sub Jumlah	<u>7.739.078.435,75</u>	<u>5.899.469.554,23</u>

c. Piutang Non Usaha

Saldo Piutang Non Usaha Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Piutang Non Kegiatan Operasional	-	1.200.000,00
Jumlah Piutang Non Usaha	<u>-</u>	<u>1.200.000,00</u>

d. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Obat-obatan	2.256.035.165,28	1.714.338.121,33
BMHP Medis	908.259.054,00	760.224.871,00
Alat Tulis Kantor	394.802.783,00	347.256.350,00
Alat Kebersihan	87.588.571,42	78.149.369,00
Bahan Cetakan	-	-
Laboratorium	-	-
Alat Listrik	129.479.030,00	78.411.835,00
Bahan Pakaian	-	-
Persediaan Bahan Makanan	19.443.194,00	19.296.143,00
Jumlah Persediaan	<u>3.795.607.797,70</u>	<u>2.997.676.689,33</u>

Saldo persediaan Per 31 Desember 2023 berasal dari stock opname yang dituangkan dalam berita acara Nomor B/14826.1/870/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 dengan nilai persediaan sebesar Rp3.795.607.797,70

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5. PENJELASAN NERACA (Lanjutan)

e. Aset Tetap

Rekonsiliasi aset tetap 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	2023			2023
	2022	Penambahan	Pengurangan	
Harga Perolehan				
Tanah	4.197.150.000	-	-	4.197.150.000
Peralatan dan Mesin	130.182.863.497	49.581.513.649	15.988.379.193	163.775.997.953
Gedung dan Bangunan	74.092.819.350	6.719.805.478	2.120.272.040	78.692.352.788
Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.627.598.001	659.802.914	308.737.080	6.978.663.835
Aset Tetap Lainnya	873.215.100	-	199.850.000	673.365.100
Konstruksi Dalam Pengerjaan	229.987.135	1.181.107.940	210.787.335	1.200.307.740
Jumlah Harga Perolehan	215.973.645.948	56.961.122.041	18.828.025.648	255.517.837.416
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan dan Mesin	86.348.022.758	10.153.387.659	-	96.501.410.417
Gedung dan Bangunan	24.444.644.470	1.282.970.702	-	25.727.615.172
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.046.922.095	195.554.416	-	1.242.476.511
Aset Tetap Lainnya	35.862.371	8.439.122	-	44.301.493
Jumlah Akumulasi Penyusutan	111.875.451.694	11.640.351.899	-	123.515.803.593
Nilai Buku Aset Tetap	104.098.194.254	11.640.351.899	-	132.002.033.823

Rincian mutasi pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Peralatan dan Mesin

Penambahan:

a) Belanja Modal TA 2023	49.220.436.249
b) Utang Pengadaan Aset 2023	361.077.400
Total Penambahan	49.581.513.649

Pengurangan:

a) Reklasifikasi ke Inventaris	1.497.024.576
b) Reklasifikasi antar KIB	331.646.384
c) Belanja Modal Yang Tidak Jadi Aset Tetap	122.021.979
d) Koreksi kelebihan pencatatan	14.037.686.254
Total Pengurangan	15.988.379.193

2) Gedung dan Bangunan

Penambahan:

a) Belanja Modal TA 2023	5.960.482.363
b) Reklasifikasi dari KDP	210.787.335
c) Utang Pengadaan Aset 2023	548.535.780
Total Penambahan	548.535.780

Pengurangan:

a) Reklasifikasi antar KIB	96.688.537
b) Reklasifikasi ke Aset lain-lain	30.000.000
c) Reklasifikasi ke KDP	872.370.860
d) Koreksi kelebihan pencatatan	1.121.212.643
Total Pengurangan	2.120.272.040

3) Jalan, Jaringan dan Irigasi

Penambahan:

a) Reklasifikasi antar KIB	428.334.921
b) Utang Pengadaan Aset 2023	231.467.993
Total Penambahan	659.802.914

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5. PENJELASAN NERACA (Lanjutan)

e. Aset Tetap (Lanjutan)

Rincian mutasi pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

3) Jalan, Jaringan dan Irigasi (Lanjutan)

Pengurangan:

a) Reklasifikasi ke KDP

308.737.080

Total Pengurangan

308.737.080

4) Aset Tetap Lainnya

Pengurangan:

a) Koreksi kelebihan pencatatan

199.850.000

Total Pengurangan

199.850.000

5) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Penambahan:

a) Reklasifikasi ke KDP

1.181.107.940

Total Penambahan

1.181.107.940

Pengurangan:

a) Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan

210.787.335

Total Pengurangan

210.787.335

f. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Software Sistem	48.326.000,00	48.326.000,00
SIM RS	-	-
Aset Lain-lain	1.527.024.576,00	149.916.667,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(1.377.099.520,00)	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(31.009.183,00)	(26.176.583,00)
Jumlah Aset Lainnya	<u>167.241.873,00</u>	<u>172.066.084,00</u>

Aset lain-lain yang dimiliki RSUD Madani merupakan inventaris yang direklasifikasikan ke aset lain-lain yang diberhentikan penggunaannya karena dalam kondisi rusak berat sesuai dengan kebijakan akuntansi terkait.

g. Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Hutang Obat	2.627.373.029,00	703.843.377,20
Hutang BHP	486.626.480,00	15.458.970,00
Hutang Alat Laboratorium	311.177.848,00	147.036.040,00
Hutang Bahan Kebersihan	130.022.070,00	-
Hutang Bahan Cetakan	37.950.900,00	-
Hutang Alat Tulis Kantor	172.639.410,00	-
Hutang BM Pengadaan Alkes	350.381.687,00	38.357.287,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	<u>4.116.171.424,00</u>	<u>904.695.674,20</u>

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5. PENJELASAN NERACA (Lanjutan)

g. Utang Kepada Pihak Ketiga (Lanjutan)

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (Hal. Sebelumnya)	4.116.171.424,00	904.695.674,20
BM Perencanaan Pembuatan Drainase Gedung Covid (15%)	4.707.750,00	4.707.750,00
BM Perencanaan Pembuatan PIPANISASI RS (15%)	3.721.200,00	3.721.200,00
BM Alat Rumah Tangga RS	16.311.000,00	-
BM Pengadaan Komputer	24.750.000,00	-
BM Pengadaan Meubelair	7.992.000,00	-
BM Perencanaan Gedung ICVCU	79.908.800,00	-
BM Rehab Gedung Perinatologi	222.804.000,00	-
BM Pembuatan IPAL	231.467.992,75	-
BM Pembangunan Gedung Endoscopy	245.822.980,00	-
Hutang Makan/Minum Petugas Covid	-	29.573.776,00
Hutang Makan dan Minum Pegawai	45.054.250,00	71.402.300,00
Hutang Makan dan Minum Pasien	175.152.540,00	451.800.563,00
Hutang Pemeliharaan Alkes	38.794.500,00	-
Hutang Pemeliharaan Sarpras	43.077.000,00	12.516.000,00
Hutang Pemeliharaan AC	33.161.250,00	27.056.250,00
Hutang Pemeliharaan Gedung	122.817.000,00	-
Hutang Pemeliharaan Kendaraan	10.784.320,00	-
Belanja Gas O2	50.505.000,00	78.020.000,00
Belanja Gas APAR	-	16.816.500,00
Belanja Limbah B3 Invoice	-	109.713.600,00
Belanja Gas LPG	17.088.000,00	-
Belanja Pemeriksaan Penunjang (Prodia)	15.961.600,00	31.808.400,00
Insentif Dokter bulan Desember 2022	-	70.000.000,00
Insentif Dokter Tamu bulan Desember 2022	-	17.500.000,00
Honor jaga Dokter bulan Desember 2022	-	13.950.000,00
Jasa Pelayanan BPJS	3.399.166.805,60	2.607.893.526,80
Jasa Pelayanan Tunai DII	912.611.495,00	707.929.669,07
Jasa Jampersal dan Jamkesda	99.738.517,60	378.475.465,20
Jasa Medik Covid	-	449.429.880,00
Hutang Jasa Listrik	-	71.276.160,00
Hutang Jasa Air	-	110.000,00
Hutang Jasa Telepon dan Internet	-	3.997.332,00
Hutang Jasa Koran/Majalah	600.000,00	600.000,00
Utang Pemeriksaan Laboratorium	4.200.000,00	-
Utang Jasa Pemeriksaan TCM	2.390.000,00	-
Utang Premi BPJS Jasa Medis	16.611.355,00	-
Utang Jasa Pemeriksaan Maxima	65.077.000,00	-
Utang Langganan Paket Telepon	1.854.654,00	-
Utang Sewa Peralatan Mata	24.200.000,00	-
Utang Bahan Bakar Minyak Ambulance	6.457.000,00	-
Utang Darah Palang Merah Indonesia	36.670.000,00	-
Utang Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.376.680,00	-
Utang Honorarium Dewan Pengawas	33.000.000,00	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	10.208.006.113,95	6.062.994.046,27

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5. PENJELASAN NERACA (Lanjutan)

h. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah nihil

i. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah nihil.

j. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Ekuitas		
Ekuitas Awal	167.614.164.059,16	174.763.133.146,09
Surplus/Defisit Tahun Berjalan	(7.437.649.714,58)	(9.329.323.639,12)
Koreksi ekuitas lainnya	(12.600.248.258,83)	2.180.354.552,19
Jumlah Ekuitas	<u>147.576.266.085,75</u>	<u>167.614.164.059,16</u>

6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

a. Pendapatan

Pendapatan RSUD Madani untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Pendapatan Jasa Layanan		
Pendapatan Jasa Layanan	45.098.323.069,00	38.206.650.058,68
Pendapatan Rawat Jalan	365.042.547,00	247.843.477,00
Pendapatan Rawat Darurat	1.528.000,00	1.680.000,00
Pendapatan Rawat Inap	757.861.164,00	776.128.962,00
Pendapatan APBD	40.351.684.366,00	31.746.006.284,00
Jumlah	<u>86.574.439.146,00</u>	<u>70.978.308.781,68</u>
	2023	2022
Pendapatan Hibah		
Pendapatan Hibah	-	11.588.128.000
Jumlah	<u>-</u>	<u>11.588.128.000</u>
	2023	2022
Pendapatan Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain		
Hasil Kerja Operasional (KSO)	441.525.500,00	17.026.200,00
Sewa	30.000.000,00	13.130.000,00
Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	-	276.522.000,00
Jumlah	<u>471.525.500,00</u>	<u>306.678.200,00</u>

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

a. Pendapatan (Lanjutan)

	2023	2022
Pendapatan Lain-lain BLUD Yang Sah		
Jasa Giro	652.149.112,25	866.224.396,28
Hasil Pemanfaatan Kekayaan	5.240.000,00	22.800.000,00
Pendapatan BLUD Lainnya	12.766.466,00	6.553.400,00
Jumlah	<u>670.155.578,25</u>	<u>895.577.796,28</u>

b. Beban Operasional

Beban Operasional untuk tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

	2023	2022
Beban Pegawai	34.542.864.542,00	34.454.768.741,00
Beban Barang dan Jasa	47.010.536.857,52	46.623.631.255,08
Beban Penyusutan dan Penyisihan	13.600.368.539,31	12.019.616.421,00
Jumlah Beban Operasional	<u>95.153.769.938,83</u>	<u>93.098.016.417,08</u>

Rincian masing-masing Beban Operasional pada tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

1) Beban Pegawai

	2023	2022
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	28.468.214.542,00	14.409.943.000,00
Tambahan Penghasilan Pegawai	-	12.650.856.576,00
Belanja Pegawai APBD	3.193.100.000,00	2.728.800.000,00
Belanja Pegawai BLUD	2.881.550.000,00	4.665.169.165,00
Jumlah Beban Pegawai	<u>34.542.864.542,00</u>	<u>34.454.768.741,00</u>

2) Beban Barang dan Jasa

	2023	2022
Jumlah Beban Barang dan Jasa	<u>47.010.536.857,52</u>	<u>46.623.631.255,08</u>

Terdapat perbedaan antara beban yang dilaporkan dalam Laporan Operasional dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp3.967.463.430,30 Berikut disajikan perbedaan antara beban dan belanja tahun 2023.

Belanja Barang Dan Jasa (LRA)	43.043.073.427,22
Beban Barang Dan Jasa (LO)	47.010.536.857,52
Selisih	<u>(3.967.463.430,30)</u>

Selisih tersebut disebabkan antara lain:

1. Adanya kenaikan persediaan per 31 Desember 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp797.931.108,37
2. Adanya kenaikan jumlah hutang jangka pendek lainnya sebesar Rp3.058.430.894,93
3. Penyesuaian Beban Barang dari Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel sebesar Rp101.332.920,00
4. Penyesuaian Beban Barang dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp9.768.507,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

3) Beban Penyusutan dan Penyisihan

Beban Penyusutan dan penyisihan untuk tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

	2023	2022
Beban Penyusutan	13.075.383.363,40	12.019.610.421,00
Beban Penyisihan Piutang	524.985.175,91	6.000,00
Beban Lain-lain	-	-
Jumlah Beban Operasional	<u>13.600.368.539,31</u>	<u>12.019.616.421,00</u>

7. TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Direktur RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 08 Mei 2024.